

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang biasanya memberikan bantuan dana berupa kredit. Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilakukan dengan jaminan fidusia. Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan bidang usaha lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan *Multi finance* yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat berharga, kartu kredit, pembiayaan konsumen. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak konsumen atau debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum sita eksekutorial sertifikat jaminan fidusia terhadap debitur yang cidera janji (wanprestasi) dan tidak mau menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi objek jaminan fidusia dan juga untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sita eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bagi debitur yang cidera janji (wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta kelemahan dan juga solusi apa yang bisa didapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan dengan Sita Eksekutorial Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan Sita Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak pengadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sita eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditur harus dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Sita Eksekutorial, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Banks are financial institutions that usually provide financial assistance in the form of credit. The credit agreement between the bank and the debtor is made with a fiduciary guarantee. Non-bank business entities and non-bank financial institutions that are specifically established to carry out activities that are in the line of business of a financial institution are called Financing Companies or Multi finance companies, which include the business fields of financing institutions, namely leasing, trading securities, credit cards, consumer finance. However, the implementation of the credit agreement is inseparable from the various obstacles and problems that accompany it, so that consumers or debtors must prepare various solutions to overcome problems that arise.

The purpose of this research is to determine the legal strength of executorial confiscation of fiduciary guarantee certificates against debtors who are in default (default) and do not want to voluntarily hand over the goods that are the object of fiduciary security and also to find out the procedures for implementing fiduciary guarantee certificate execution for debtors who are in default after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019.

The method used in this research is normative juridical. This type of juridical empirical research discusses the facts or data that exist in practice which is then linked to the applicable legal provisions. This method aims to understand or understand the symptoms of the law to be investigated by emphasizing the understanding of the problem with the Executorial Sita on Fiduciary Guarantee. This research was conducted by collecting literature materials related to Executive Confiscation Post-Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 Against Law Number 42 Year 1999 Regarding Fiduciary Guarantee. This research was conducted by interview (interview), namely data collection by asking direct questions to the court.

The results of this study indicate that based on the decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019, the execution of fiduciary guarantees carried out by the creditor must be carried out when there is an agreement regarding the default and the debtor's willingness to hand over the object which is the object of fiduciary. If there is no agreement regarding default and the debtor does not voluntarily submit the object of collateral, the fiduciary guarantee execution procedure is carried out the same as the execution of a court decision which has permanent legal force.

Keywords: Executive Confiscation, Constitutional Court Decision, Fiduciary Guarantee